

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setelah dilakukan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menentukan konflik norma hukum *lex specialis* dan *lex generalis* sebagai dasar pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Hasilnya penelitiannya dalam pengaturan dan pengurusan Urusan pemerintahan merupakan segala hal yang terkait dengan pengelolaan negara dan masyarakat oleh pemerintah. Ini meliputi pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, penyelenggaraan layanan publik, dan penegakan hukum. Ternyata sejak perkembangan urusan pemerintahan sampai sekarang adanya konflik kepetingan yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan dan kewenangan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berdampak pada penerapan prinsip norma hukum *lex specialis* dan *lex generalis* dalam norma hukum untuk pengurusan dan pengaturan urusan pemerintahan dalam satu kementerian. Dalam hal konflik *lex specialis* dan *lex generalis* dapat dianalisis dari 4 aspek dengan tujuannya untuk menentukan konflik yang sesungguhnya terjadi yaitu perkembangan pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pengaturan tentang kementerian, sistem pemerintahan Indonesia pada

kementerian, konsep norma validasi pada urusan pemerintahan, sebagai pemberlakuan norma sebagai pijakan pada kementerian tersebut, yang ternyata mengakibatkan bahwa segera adanya penentuan satu urusan pemerintahan dalam satu tanggung jawab kementerian yang sangat luas pada pelaksanaannya. Karena mengingat bahwa sejak dekrit 5 Juli 1959 presiden dan amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri itu bukanlah pejabat tinggi negara yang biasa, hal ini mengakibatkan juga bahwa pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya adalah kementerian dalam bidangnya masing-masing. Urusan pemerintahan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

2. Penyelesaian konflik norma hukum terkait pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan dalam perspektif norma hukum *lex specialis* dan *generalis* berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Penyelesaian konflik norma hukum pengaturan dan pengurusan pemerintahan *lex specialis* dan *generalis* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, menunjukkan bahwa substansi penjabaran termuat adanya pelaksanaan kekuasaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian yang harus dilakukan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab serta diarahkan dalam memperkuat sistem presidensial yang di jalankan. Jika dalam satu tugas kementerian ada dua kementerian yang menjadi tanggung jawabnya pada ketentuan urusan mana sebagai pelaksanaan aturan yang akan digunakan sebagai pemberlakuan *spesialis* atau *generalis* maka penyelesaiannya disesuaikan kondisi

pelaksanaan wewenangnya dan norma yang umum dan khusus yang di sesuaikan pada ketentuan substansi yang di jabarkan. Jika memverifikasikan jenis urusan pemerintahan dan norma pada perundang-undang yang hendak dijalankan oleh kementerian klaster atau semakin ke atas harusnya bersifat umum sehingga daya laku tidak cepat ketinggalan begitu pula sebaiknya jika jenis urusan di khususkan pada perintah dan norma perundang-undang semakin ke bawah dirumuskan lebih teknis lagi ruang penafsiran atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan norma yang akan dilaksanakan ruang penafsiran yang harus jelas dengan tugas kementerian yang menjadi tugas pokok di bidangnya, karena pada prinsipnya norma dalam perintah khusus dan umum sebagai salah satu klaster urusan pemerintahan yang di sesuaikan dalam norma sebuah peraturan perundang-undangan untuk penerapan bahwa penyelesaian konflik setiap norma untuk urusan pemerintahan harus memperhatikan norma yang dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Hal berlaku jika temukan bahwa yang *specialis* belum tentu sebagai klaster yang perintah yang khusus dan klaster yang umum belum tentu sebagai perintah yang khusus pula. Hal ini juga tidak dengan omnibuslaw yang sekarang digadang-gadang menimbulkan masalah sebagai salah satu koordinasi penyelesaian ataupun dengan penyelesaian dengan menggunakan metode mediasi yang menjadi pelopor yaitu Kementerian Hukum Dan Ham yaitu PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangn Melalui Mediasi.

## B. Saran

Pada ketentuan urusan pemerintahan yang akan di jalankan oleh kementerian berada pada ketentuan Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai condong substansi agar menteri-menteri bergerak sesuai kinerja dan kementeriannya masing-masing, jadi harus di perhatikan lagi tugasnya dalam bentuk apa dan perintah bersifat umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan masing-masing kementerian dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan antar kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara frasa pasal 4 dan 5 yang menyebutkan jenis-jenis urusan pemerintahan harusnya di perhatikan lagi penjabaran norma sebagai pengurusan dan pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas tujuan jelas dan asas organ yang tepat agar undang-undang rezim bersifat politik ini terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri dengan perintahnya dengan satu urusanya yang di jabarkan agar setiap menteri tidak *overlapping* pada atauran yang sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai *ius constituendum* kedepannya. Jika konsep negara harusnya the rule of law yang di sesuiakn takutnya dengan adanya konflik ini menjadi the rule of by law.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abadi, H. (2017). *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Terbitan I Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Anis, dkk. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Terbitan I. Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Bahri, S. (2023). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia (Edisi 2023)*. Kuningan: Bahasa Rakyat.
- Bambang, W. (2017). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Terbitan II. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Cipto Handoyo, H. B. (2021). *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Efensi & Dyah. (2024). *Logika Dan Argumentasi Hukum*. Terbitan IV. Jakarta: Kencana.
- Endrik Safudin, 2021, *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Terbitan I. Malang:Q Media.
- Fakhry dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Hardi dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Huda,, N., & Nazriyah. (2019). *Teori Dan Pengujian Perundang-Undangan*. Terbitan ke II. Bandung: Nusa Media
- Hyronimus Rhiti. (2023). *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pt Kanisius.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Terbitan Ke II. Bandung: Alfa Beta.
- Ismail Nurdin. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Terbitan Ke I. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books.
- Jeremy Bentham. (2022). *Teori Perundang-Undang Prinsip-Prinsip legislasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana*. Terbitan V. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Terbitan II. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Jimly & Ali. (2021). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Terbitan I. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jonaedi, & Johnny. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Terbitan I. Depok: Prenada Media Group.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Terbitan Ke II Bandung: Yrama Widya.

- Luthfi. (2017). *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Terbitan II. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Mahfud, M. M. (2020). *Politik Hukum*. Terbitan I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marwan. (2018). *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Terbitan I. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Multahibun, & Sarip. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Terbitan I Cirebon: Cv Elsi Pro.
- Mustafa E. M. (2022). *Prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia, Dikaitkan Dengan Trips-WTO*. Terbitan I. Bandung: Pt Alumni.
- Musri & Rizki. (2022). *Etika Administrasi Publik*. Terbitan I Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Nurul, H. (2022). *Hukum Lembaga Negara*. Terbitan II. Bandung: Refika Aditama.
- Pataniari. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Terbitan I. Jakarta: Konpress.
- Redi, A. (2019). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Terbitan Ke II. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rendy, dkk. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Terbitan I. Sleman: Cv Budi Utama
- Rio Christiawan. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Terbitan Ke I. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Rohayatin, T. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Rachmat & Indah. (2022). *Politik Hukum Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan*. Terbitan I. Depok: Papar Sinar Sinanti.
- Rohman dkk. (2023). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Terbitan I. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- Saifudin, E. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Terbitan II. Malang: Setara Press.
- Safudin,E (2021). *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*.Terbitan I, Malang:Q Media.
- Suhariyono. (2022). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Pedoman Praktis*. Terbitan I. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Sulistyowati, & Nurhasan. (2023). *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas*. Terbitan I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Terbitan I. Jawa Timur: Unigress Press.
- Siti & Hadi. (2024). *Hukum Tata Negara*. Terbitan I. Jakarta Timur: Academia Publication.
- Syah, R. S. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang Serta Pembentukannya*. Terbitan I. Makassar: Cv Social Political Genius.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Terbitan Ke III. Jakarta: Kencana.

- Trihastuti, E. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Terbitan I. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Weni, P. (2018). *Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi Dan Pendidikan*. Terbitan I. Yogyakarta: Deepublish.

### **Artikel Karya Tulis Ilmiah:**

- Agnes, F. 2019. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan Volume 6 Nomor 3 Halaman 306.
- Ade & Majid. 2021. *Analisis Kritis Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Sengketa Perundang-Undangan Melalui Mediasi*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 6 Nomor 1 Halaman 111.
- Ahmad,dkk. 2023. *Ketaatan Konstitusi Sebagai Upaya Membangun Pondasi Negara*. Jurnal Pendidikan dan Kependidikan Volume 2 Nomor 1 Halaman 72.
- Alfonsus, N. 2023. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humoniora. Volume 2 Nomor 3 Halaman 4.
- Atmadja, D. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana Volume 12 Nomor 2 Halaman 146
- Arifardhani, Y. 2019. *Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik*. Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 1 Nomor 1 Halaman 65.
- Afrinald, R. 2020. *Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (NOMOSTATIS) Hanz Kelzen*. Jurnal Kodifikasi Volume 3 Nomor 1 Halaman 63 - 64.
- Akbar & Arinto. 2017. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya. Volume 4 Nomor 1 Halaman 4.
- Busro, F. 2017. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. Jurnal Arena Hukum Volume 10 Nomor 2 Halaman 230.
- Botutihe, D. 2023. *Problematika UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Al-Himayah Volume 7 Nomor 1 Halaman 26.
- Darmawan, S. F., & Tawang, A. D. 2018. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR*. Jurnal Hukum Adigama Volume 1 Nomor 2 Halaman 4.
- Disemadi, S. H. 2022. *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum*. Journal of Judicial Review Volume 24 Nomor 2 Halaman 292.
- Faissal, M. 2021. *Tinjauan Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 1 Halaman 195.
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. D. 2018. *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City*. Journal Of Public Policy Volume 3 Nomor 4 Halaman 2.

- Fitryantica, A. 2019. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan Volume 6 Nomor 3 Halaman 306.
- Gibran. 2022. *Pelaksanaan Rups Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE*. Jurnal Law of Deli Sumatera Volume 1 Nomor 2 Halaman 8
- Hamdani, F., & Fauzia, A. 2022. *Gagasan Judicial Review terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 1 Halaman 12.
- Hafist & Martadi. 2020. *Perancangan Sosial Animasi Explainer Mencegah Perpecahan Milenial Pasca Pemilu 2019 Di Surabaya*. Jurnal Barik Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 2 Halaman 96.
- Heldi, dkk, 2021. *Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi*. Jurnal Dialektika Volume 19 Nomor 1 Tahun 2021 Halaman 5-6.
- Hidayah, & Arifin. 2019. *Politik Hukum Sebagai Social-Equilibrium DI Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum Volume 4 Nomor 2 Halaman 149.
- Irwandi & Endah, 2017. *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Volume 8 Nomor 2 Halaman 23.
- Lathif, N. 2017. *Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. Pakuan Law Review Volume 3 Nomor 1 Halaman 74.
- Latipulhaya, A. 2016. *Khazanah: John Austin*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Halaman 440.
- Mario, A. 2022. *Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara*. Jurnal Constitution. Volume 1 Nomor 2 Tahun 171.
- Nurbaiti, 2015. *Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Manajemen Pemerintahan Volume 7 Nomor 15 Halaman 6.
- Nency, dkk, 2022. *Kedudukan Lembaga Negara Antara Indonesia Dengan Filipina*. Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 Halaman 51.
- Nyoman & Bagus, 2018. *Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Rangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensial*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15 Nomor 2 Halaman 94.
- Pascal Toloh. 2022. *Dilema Amandemen Konstitusi: Urgensitas Amandemen Dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis*. Jurnal Tumou Tou Law Review. Volume 1 Nomor 2 Halaman 61.
- Putra dkk. 2023. *Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris*. Jurnal Indonesia Berdaya Volume 4 Nomor 2 Halaman 681.

- Ras, H., & Suros, T. J. 2020. *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) . Volume 4 Nomor 1 Halaman 398.
- Rina & Yahman, 2019, “*Konflik Norma Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Tentang Pencatatan Dan Penghapusan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah*” Jurnal Ubhara Surabaya, Volume 9 Nomor 2 Halaman 122.
- Rejekiningsih, T. 2016. *Asas Fungsi Sosial Atas Tanah Pada Negara Hukum ( Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Yustitia Volume 5 Nomor 2 Halaman 306.
- Ridlwan. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2 Halaman 141.
- Safudin, E. 2020. *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*. Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies Volume 2 Nomor 2 Halaman 202-203.
- Sandur, S. 2019. *Analisis Pandangan Politik Thomas Aquinas*. Jurnal Filsafat dan Teologi Volume 2 Nomor 2 Halaman 30.
- Saqia dkk. 2022. *Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 8 Nomor 14 Halaman 301.
- Sihombing, E. 2016. *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Sipil Di LInkungan Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 16 Nomor 1 Halaman 99.
- Supriyadi. 2020. *Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)*. Jurnal Adhyasta Pemilu Volume 3 Nomor 2 Halaman 147.
- Suparman, O. 2023. *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System*. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Volume 2 Nomor 1 Halaman 60.
- Wiratma, M. I., & Simangunsong, F. 2023. *Pengembangan Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Pembantu Dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11 Nomor 1 Halaman 17.
- Wiwik, D. 2022. *Eksistensi Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 Sebagai Upaya Tumbangkan Kepemimpinan Soekarno*. Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 3 Nomor 2 Halaman 30.
- Zaki, U. 2016. *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Legilasi Indonesia. Volume 13 Nomor 2 Halaman 214.

**Internet:**

- Aris Contoh Norma Hukum: Pengertian, Sanksi, Pelanggaran Norma Hukum: <https://www.gramedia.com/literasi/norma-hukum/>, diakses 25 Oktober 2023
- Ariya Prayoga, Bola Net, <https://www.bola.net/indonesia/erick-thohir-rangkap-jabatan-menteri-bumn-dan-ketua-pssi-sebenarnya-boleh-atau-tidak-90e23f.html>, diakses 29 Mei 2024.
- Biro Pers, Media, Dan Informasi Sekretariat Presiden, <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>, diakses 18 April 2024
- Corps Zhamrawut Kamus Hukum Online Indonesia: <https://kamushukum.web.id/arti-kata/lex/>, diakses 10 Oktober 2023
- Dahlia, 2022, "Format Pemerintahan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah", <https://osf.io/preprints/osf/pzadw>, diakses 19 Maret 2024
- Fajar Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum: <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/membedakan-prinsip-hukum-dan-asas-hukum-1wIvCghYK2/full>, diakses 21 Oktober 2023
- Inspira Law Ius,Rect. <https://inspira-law.com/2021/03/13/kamus-1/>, diakses 10 Oktober 2023
- Issha Harruma, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/21/02000041/struktur-pemerintahan-indonesia?page=all>, diakses 25 Maret 2024
- Jago kata, <https://jagokata.com/arti-kata/pengurusan.html>, diakses 28 febuari 2024
- Kbbi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan>, diakses 19 Maret 2024
- Lab Ilmu Pemerintahan, <https://labip.umy.ac.id/tahu-nggak-sih-perbedaan-negara-dan-pemerintah/>, diakses 16 Maret 2024
- Legal Information Institute, [https://www.law.cornell.edu/wex/legal\\_realism](https://www.law.cornell.edu/wex/legal_realism), diakses 23 Mei 2024
- Michal Araszkiwicz dan Krzysztof Pleszka. 2015. *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*. Switzerland: Springer International Publishing. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-19575-9>, Halaman 148-149.
- Muhamand Yamin, Risalah Himpunan Risalah Sidang Pembukaan UUD 1945, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>, diakses 23 Mei 2024.
- Penyelesaiankonflik,[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod\\_resource/content/1/refleksi.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/refleksi.html) diakses 1 Juli 2024
- Sekda Baleg Umum, <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sistem-pemerintahan-indonesia-20>, diakses 24 Maret 2024
- Setkab Sekertaris Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/>, diakses 29 Oktober 2023
- Shidarta, & Petrus, L. (Binus UNiversity. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI: MAKNA DAN PENGGUNAANNYA: <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi->



Naskah Akademik Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

